

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aloysius Wisnubroto & G. Widiartana.2005.Pembaharuan Hukum Acara Pidana. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- Anwar, Yesmil.2009.Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Widya Padjajaran.
- Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry.2017.Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arrasjid, Chainur.2000.Dasar-dasar Ilmu Hukum.Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakri,M.2011. Pengantar Hukum Indonesia.Malang: UB Press.
- Djamali, Abdoel. 2010. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Presda.
- Fadjar Mukti & Yulianto Achmad.2009.Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi.2017.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya.2010.Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Taufik Makarao dan Suhasril.2004. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Lilik.2012. Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan. Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti.
- Najih,Mokhamad.2012. Pengantar Hukum Indonesia.Malang: Setara Press.
- Rahardjo ,Satjipto.2000.Ilmu Hukum.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salam, Moch. Faisal.2001.Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek.Bandung: Mandar Maju.
- Sofyan, Andi.2017. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar.Jakarta: Prenada Media.
- Utsman ,Sabian.2008.Menuju Penegakan Hukum Responsif.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zulkarnain.2013.Praktik Peradilan Pidana.Malang: Setara Press.

Tesis/Jurnal/Artikel

- Garry, Watuseke. "Eksistensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman". 2017. *Lex Administratum*, Volume V Nomor 6.
- Hiariej, Eddy O.S. "Pengantar Hukum Acara Pidana". 2017. *Syariah : Jurnal ilmu hukum dan pemikiran*. Hal.227.17(2) Vol. 17.
- Kaligis, Otto Cornelis. "Hukum Acara Pidana Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia (Tinjauan Empiris Terhadap Keseimbangan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia)". 2007. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37 No.2*. Vol. 29.
- Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media". 2017. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia* Volume 24 Issue 3.
- Lumbanraja. Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19". 2020. *Jurnal Crepido* Volume 02 Nomor 01.
- Mahardipa, Made Witama dkk. "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B". 2019. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. II Nomor 3.
- Rozi, Fachrul. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana". 2018. *Jurnal Yuridis Unaja*, Volume I Nomor 2.
- Saputra, Beri. "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata di Kota Pangkal Pinang)". 2017. *Jurnal Hukum Progresif*, Volume XI Nomor 2.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman". 2016. *JOM FAKULTAS HUKUM* Volume III Nomor 2.
- Supriyanta. "KUHP Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu". 2009. *Wacana Hukum*, Volume VIII Nomor 1.
- Susanti, Christine. "Penerapan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan Hubungan Industrial". 2012. *Law Review*, Volume XII Nomor 1.

Terry Tommy, Sorongan. “Eksepsi Dalam Kuhap Dan Praktek Peradilan”. 2016. Lex Crimen, Volume V Nomor 4.

Wangol, Winly A. “Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Kuhap”. 2016. Jurnal Lex Privatum, Volume IV Nomor 7.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.PK.01.01.01-03 tentang Pencegahan, Penanganan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lapas/Rutan.

Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/Suja/03/2020 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19.

Sumber Lain

Hasil Wawancara dengan Deny Ikhwan, S.H, M.H , selaku Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 dan 25 Januari 2021.